

Pejabat Kemendagri: organisasi Hansip terpinggirkan

Jumat, 4 Mei 2012 17:20 WIB | 785 Views

Phnom Penh (ANTARA News) - Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di daerah-daerah telah mengambil alih peran Hansip sehingga eksistensi organisasi Pertahanan Sipil ini seakan-akan terpinggirkan, kata seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri.

"Tugas Hansip sebagai pelindung masyarakat saat terjadi peperangan dan bencana alam juga tidak lagi terlihat. Hansip sering jadi bahan lawakan, pekerjaannya direduksi hanya jaga gardu ronda dan pukul kentongan," kata Kepala Divisi Kerja Sama Organisasi Internasional Kementerian Dalam Negeri, Basilio Dias Araujo di Phnom Penh, Jumat.

Pada Konferensi Regional Penguatan Desentralisasi dan Pemerintahan Lokal di ASEAN tersebut, Basilio mengatakan Hansip bukan profesi remeh, karena diakui oleh Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagai sukarelawan yang bisa dimobilisasi secara sukarela saat terjadinya keadaan darurat seperti terjadinya bencana alam dan perang.

Di dunia internasional, organisasi Hansip diakui dan berada dalam wadah International Civil Defense Organization (ICDO). Saat terjadi tsunami di Aceh dan gunung Merapi meletus, banyak organisasi Hansip dari negara-negara lain datang membantu.

"Mereka bertanya-tanya di lokasi bencana mana Hansip Indonesia? Karena dunia internasional tahunya Hansiplah yang biasa dimobilisasi untuk membantu penanggulangan bencana," kata pejabat Indonesia yang pernah bertugas di Portugal itu.

Basilio mengaku masgul dan frustrasi dengan banyaknya organisasi baru yang dibentuk untuk menggantikan organisasi lama yang sebetulnya lebih baik seperti dalam pembentukan BNPB yang bisa mereduksi peran Hansip dalam mobilisasi penanggulangan bencana.

"Hansip itu dari sejarahnya mengedepankan sukarela, bukan bayaran seperti sekarang. Jika terjadi bencana sekarang, untuk memobilisasi orang untuk tanggap bencana, mereka akan tanya berapa bayarannya, karena BNPB tak punya sukarelawan," katanya lagi.

Saat ini, Hansip berubah menjadi organisasi Perlindungan Masyarakat (Linmas). Walaupun embrionya sudah ada sejak masa akhir Hindia Belanda, secara resmi Hansip lahir pada 1954 melalui Undang-Undang Nomor 29/1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia dalam konteks Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).

"Tapi Hansip bukan *underbouw* (bawahan,red) TNI. Misi Hansip untuk melindungi hak-hak masyarakat sipil dan aset-asetnya pada situasi perang ataupun saat terjadi bencana sesuai Konvensi Jenewa 12 tahun 1949 dan 1970," katanya.

Pada 1972, lanjut Basilio, terjadi perombakan pada tubuh organisasi Hansip, Wanra, dan Ratih (Rakyat Terlatih). Pascaperombakan tersebut, tugas Hansip semakin diarahkan guna perlindungan masyarakat sipil beserta aset-asetnya bila terjadi perang dan bencana.

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1972, organisasi ini diserahkan dari yang tadinya di bawah Departemen Pertahanan Keamanan (Dephankam) ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Setelah dikeluarkannya keputusan tersebut, maka Hansip berada di bawah pengawasan bupati dan gubernur pemerintah daerah.

Kemudian lahir lagi beberapa peraturan hukum tentang keberadaan Hansip. Fungsinya sebagai pelindung masyarakat ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Setelah Orde Baru runtuh, Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dengan keluarnya peraturan ini maka keberadaan serta peran dan fungsi Hansip tidak lagi diatur secara tegas dan bahkan seolah-olah hilang.

"Hansip termarginalkan, padahal organisasi ini sangat penting untuk penanggulangan bencana yang didasarkan pada sukarelawan, bukan bayaran," demikian Basilio Dias Araujo.

Ia mengusulkan agar Konferensi Regional ini memberikan rekomendasi kepada pemerintahan di ASEAN, termasuk Indonesia, agar memperkuat kembali peran Hansip dalam mobilisasi sukarelawan dalam penanggulangan bencana.

Konferensi yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Kamboja Sak Setha itu diselenggarakan oleh Proyek Uni Eropa untuk mendukung desentralisasi di negara berkembang (www.uclg-aspac.org) dan Kemitraan untuk Pemerintahan Lokal yang Demokratis di Asia Tenggara (www.DELGOSEA.eu).

(T.A017/A011)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012